

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior* (Second Edition). New York: Open University Press.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Boediono. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dunn, W. N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. New York: Cambridge University Press.
- Larsen, L. B. (2018). *A Fair Share of Tax A Fiscal Anthropology Contemporary Sweden*. Linköping: Palgrave Macmillan.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nursalim, M., & dkk. (2017). *Psikologi Pendidikan*. Suarabaya: Unesa University Press.
- Rawls, J. (1999). *A Theory Of Justice (Revised Edition)*. Massachusetts: The Belknap Of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts.
- Smith, A., Cannan, E., & Stigler, G. J. (1992). *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*. ElecBook Classics.
- Soekanto, S. (1997). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Subroto, G. (2020). *Pajak Dan Pendanaan Peradaban Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Pemerintah RI. (1945). Undang - Undang Dasar 1945.
- Pemerintah RI. (2008). Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 . *tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008*.
- Pemerintah RI. (2021). Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021. *tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Peraturan Pemerintah. (2009). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 . *tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009*.

- Peraturan Pemerintah. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 .
tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- Peraturan Pemerintah. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Anggraeni, R. (2007). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kawasan Sidoarjo Barat Tidak Mengisi Sendiri SPT Tahunannya.
Unpublished undergraduate thesis Universitas Kristen Petra.
- Ardyanto, A. A., & Utaminingsih, N. S. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Analysis Journal*, 220-229.
- Dharma, G. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 340-353.
- Firmanda, S. (2017). Pengaruh Motivasi Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Dan Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal AKUNESA*, 1-24.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 124-135.
- Irawan, F., & Erdika, F. A. (2020). Analisis Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kantor Pelayanan Pajak Prataman Malang Selatan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 57-66.
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). *Tesis Magister. FEB UNDIP.*
- Marfiana, A. (2019). Tren Kepatuhan Pajak Pengusaha UMKM Di KPP Pratama Merauke Atas Berlakunya Pengenaan PPh Final Atas Omset. *Jurnal Pajak Indonesia*, 10-16.
- Mustafa, H. (2011). Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 47-60.
- Nasution, B. J. (2014, Mei - Agustus). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia*, 118-130.

- Nugroho, A. (2005). *Strategi Jitu: Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- OECD. (2004). *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*.
- OECD. (2014). *Tax Compliance by Design Achieving Improved SME Tax Compliance by Adopting A System Perspective*.
- Parasuraman, B. Z. (1985). A Conceptual Model Of Service Quality Implication Future Reasearch. *Journal of Marketing*, 41-50.
- Pujilestari, H. e. (2021). Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 36-51.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapi*, 10, 1-25.
- Saputra, H. (2019, April 1). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior) (Terhadapa Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3, 47-58.
- Satya, V. E., & Dewi, G. P. (2010, Juni). Perubahan Undang - Undang Pajak Penghasilan dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol.1, 75-100.
- Suci, T. S., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2019). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 362-370.
- Suheri, A. (2018, Juni). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Nasional. *Jurnal Morality*, 4(1), 60-68.
- Sularsih, H. (2018). Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM Di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 3, 1-8.
- Sulistianingrum. (2009). Kualitas Pelayanan Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP pratama Jakarta Setibudi Satu). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*.
- Usman, A. H. (2014, Februari). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30, 26-53.

- Wardana, A. B. (2021). Menakar Keadilan Pajak Penghasilan dan Insentif Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia*, 192-205.
- Widi, D., & Bambang, P. (2012). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat Sebagai Variabel Interventing. *Jurnal Akuntansi*.
- Yusuf, M. (2016, Mei). Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu. *Jurnal Lentera Akuntansi*, Vol.2, 22-42.
- Siaran Pers Kemenkeu, 3. J. (2022). *Siaran Pers: APBN 2021 Telah Bekerja dan Berkinerja Positif dalam Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan. Jakarta: kemenkeu.go.id. Retrieved Januari 23, 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-2021-telah-bekerja-keras-dan-berkinerja-positif-dalam-pengendalian-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional/>
- Wildan, M. (2022, Januari 06). *DDTC News*. Retrieved Januari 23, 2022, from news.ddtc.co.id: <https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-capai-84-per-akhir-2021-35875#:~:text=Ilustrasi.,2020%20mencapai%2015%2C97%20juta.>